

**KINERJA PENANGANAN
KASUS KORUPSI
SEMESTER I 2016**

© INDONESIA CORRUPTION WATCH
JAKARTA

LATAR BELAKANG

- Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan.
- Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

TUJUAN

- Melakukan pemetaan atas kasus korupsi yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum pada semester I 2016, meliputi : jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi, jabatan pelaku.
- Monitoring dan menganalisis kinerja Aparat Penegak Hukum dalam menyidik Kasus korupsi tahun 2010 hingga 2015.
- Mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

METODOLOGI

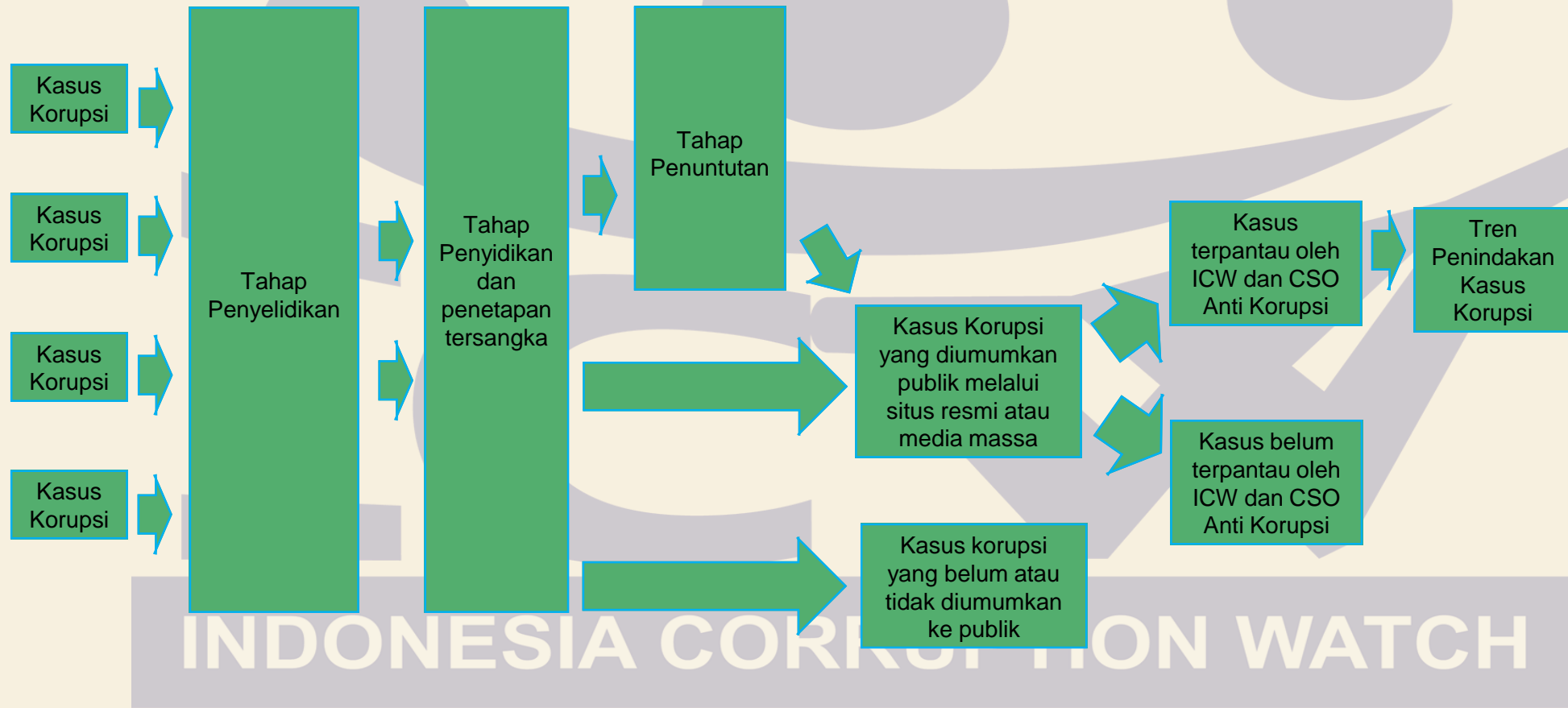
- Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.
- Pengumpulan data kasus korupsi yang telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.
- Melakukan tabulasi atas kasus – kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.
- Membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuaapan berdasarkan tahun.
- Melakukan analisis deskriptif atas kinerja penyidikan kasus korupsi.

SUMBER DATA & WAKTU PEMANTAUAN

- Website resmi Institusi Penegak Hukum
- Media Online dan Cetak
- Periode : 1 Januari – 30 Juni 2016

INDONESIA CORRUPTION WATCH

BAGAN SUMBER DATA TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI



INDONESIA CORRUPTION WATCH



TEMUAN

KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2016

• INDIKATOR KINERJA PENINDAKAN :

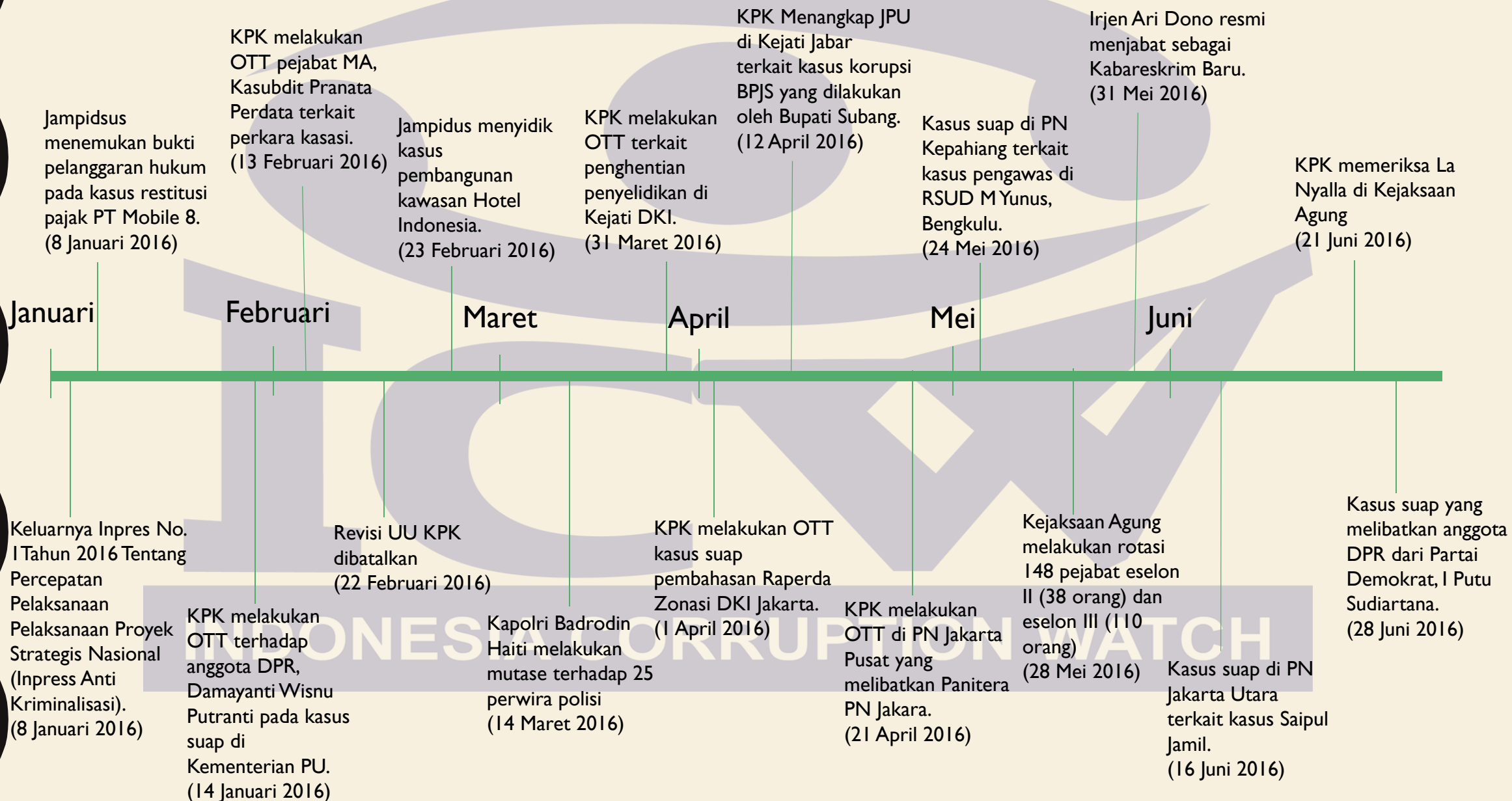
- Berapa kasus naik dari penyelidikan ke penyidikan?
- Berapa kasus naik dari penyidikan ke penuntutan?
- Berapa penyidik dan anggaran yang dihabiskan untuk menangani tersebut?
- Berapa tunggakan perkara korupsi (kasus yang tetap berstatus penyidikan dari sem II 2015)?
- APH (Aparat Penegak Hukum) paling banyak menunggak kasus?
- Berapa banyak kasus?
- Berapa kerugian negara?
- Berapa tersangka?
- Bagaimana profil kasusnya?



INDONESIA CORRUPTION WATCH

- Berapa banyak kasus?
- Berapa kerugian negara?
- Berapa tersangka?
- Bagaimana profil kasusnya?

KEJADIAN PENTING (KEBIJAKAN DAN KASUS) TERKAIT PENINDAKAN SELAMA SEMESTER I 2016





KINERJA PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI APH SEM I 2016



**KINERJA
PENYELIDIKAN
DIUKUR
BERDASARKAN
KASUS KORUPSI
YANG MASUK TAHAP
PENYIDIKAN**

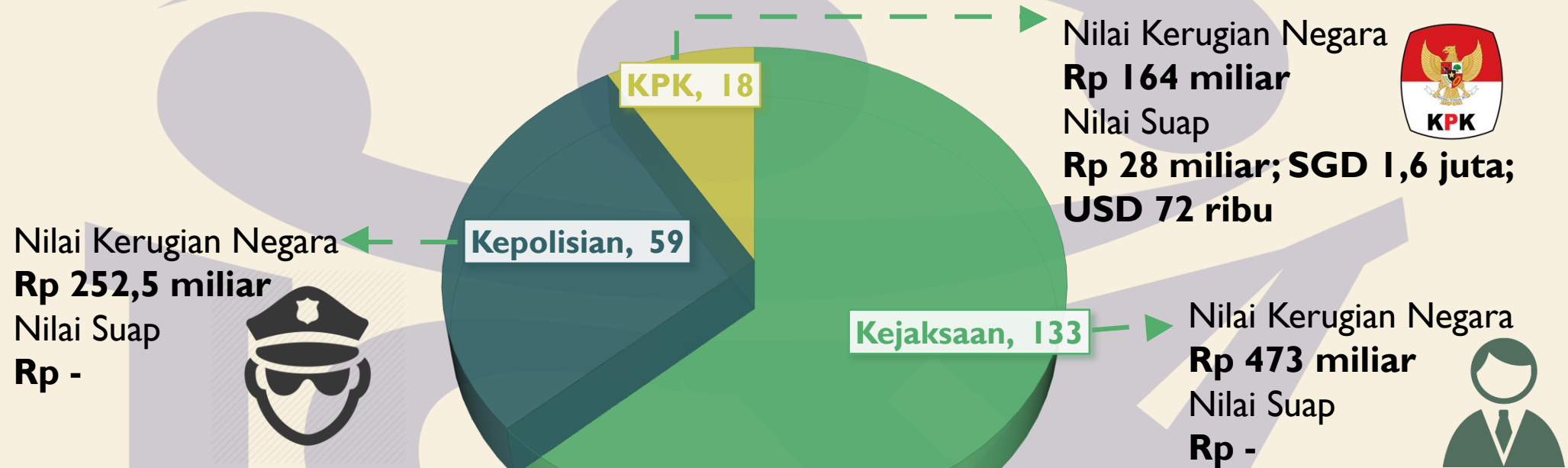
KINERJA PENYELIDIKAN APH SELAMA SEMESTER I 2016 (PENYELIDIKAN → PENYIDIKAN)

KETERANGAN	SEMESTER I 2016
Jumlah Kasus	210 kasus
Jumlah Tersangka	500 orang
Nilai Kerugian Negara	Rp 890,5 miliar
Nilai Suap	Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, USD 72 ribu

Selama semester I 2016, APH berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus dimana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta dan USD 72 ribu, dengan jumlah tersangka sebanyak 500 orang.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

PENANGANAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEMESTER I 2016



- Pada semester I 2016, Kejaksaan paling banyak menangani kasus korupsi yakni 133 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 473 miliar dan nilai suap sebesar Rp 14 juta.
- Sedangkan Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 252,2 miliar.
- Sementara itu, KPK menangani 18 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 164 miliar dan nilai suap sebesar Rp 28 miliar; SGD 1,6 juta; USD 72 ribu.

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
Penggelapan	70	164	
Kegiatan / Proyek Fiktif	34	246,8	
Penyalahgunaan Anggaran	25	96,5	
Mark Up	23	107	
Penyalahgunaan Wewenang	19	218,1	
Mark Down	-	-	
Laporan Fiktif	13	14,6	
Suap / Gratifikasi	15		28,6
Penyunatan / Pemotongan	8	37,4	
Pemerasan	2	0,07	
Anggaran Ganda	-	-	
Pungutan Liar	1	0,17	
Pencucian Uang	1	5,3	
TOTAL	210	890,5	28,6

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN MODUS

- Modus yang paling sering terjadi selama semester I 2016 adalah penggelapan dengan 70 kasus korupsi.
- Selain itu, proyek fiktif menjadi modus kedua yang sering terjadi dengan total kasus sebanyak 34.
- Modus penyalahgunaan anggaran terbanyak ketiga dengan total kasus sebanyak 25.

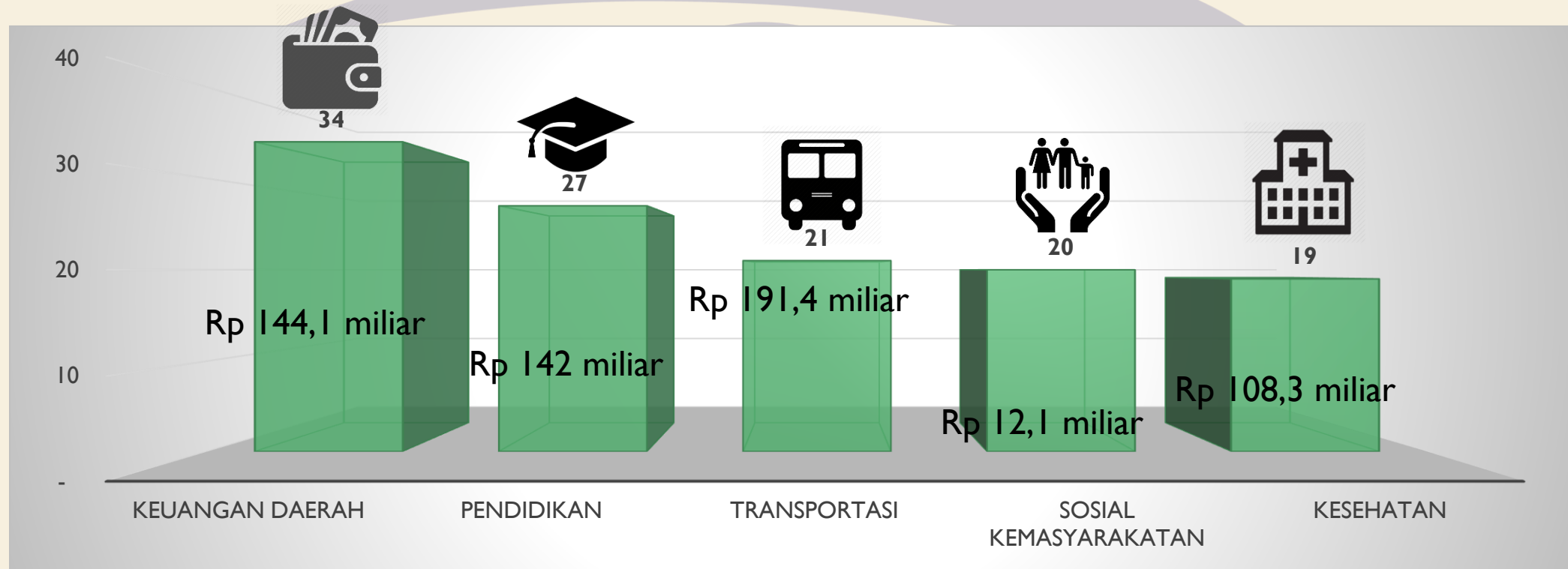
ON WATCH

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN JENIS KORUPSI

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
Kerugian keuangan negara	185	883,8	
Suap Menyuap	14		28,6
Penggelapan dalam jabatan	9	6,5	
Pemerasan	2	0,07	
TOTAL	210	890,5	28,6

- Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi, yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
- Jenis korupsi kerugian keuangan negara menjadi pasal yang paling sering dipakai oleh APH sekitar 88 persen.

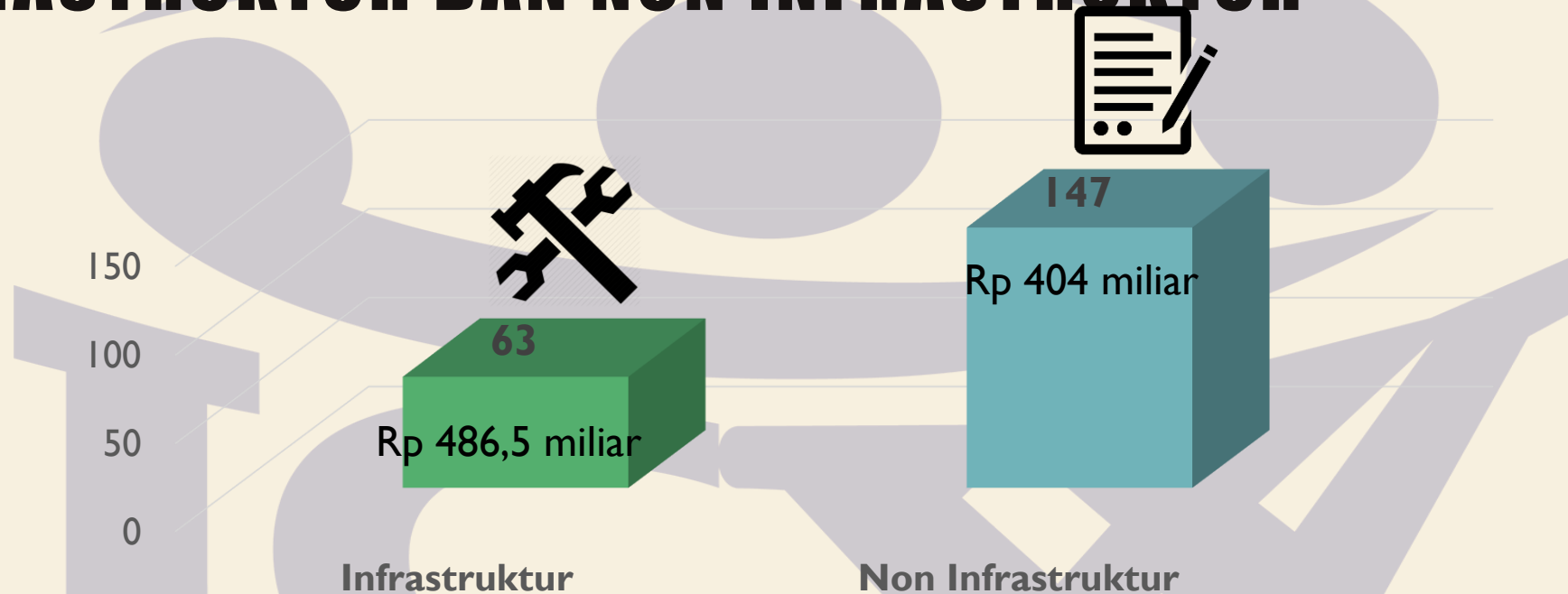
KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN SEKTOR (5 TERATAS)



- Sektor keuangan daerah menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi dengan 34 kasus.
- Sektor pelayanan publik menjadi sektor kedua yang paling rentan dikorupsi.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN KATEGORI INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR



- Korupsi infrastruktur sebanyak 63 kasus. Total nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 486,5 miliar atau 55 persen.
- Korupsi non-infrastruktur sebanyak 148 kasus. Total nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 404 miliar atau 45 persen.
- Nilai kerugian negara yang ditimbulkan cenderung besar di bagian infrastruktur meski jumlah kasus lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena anggaran infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan non infrastruktur.

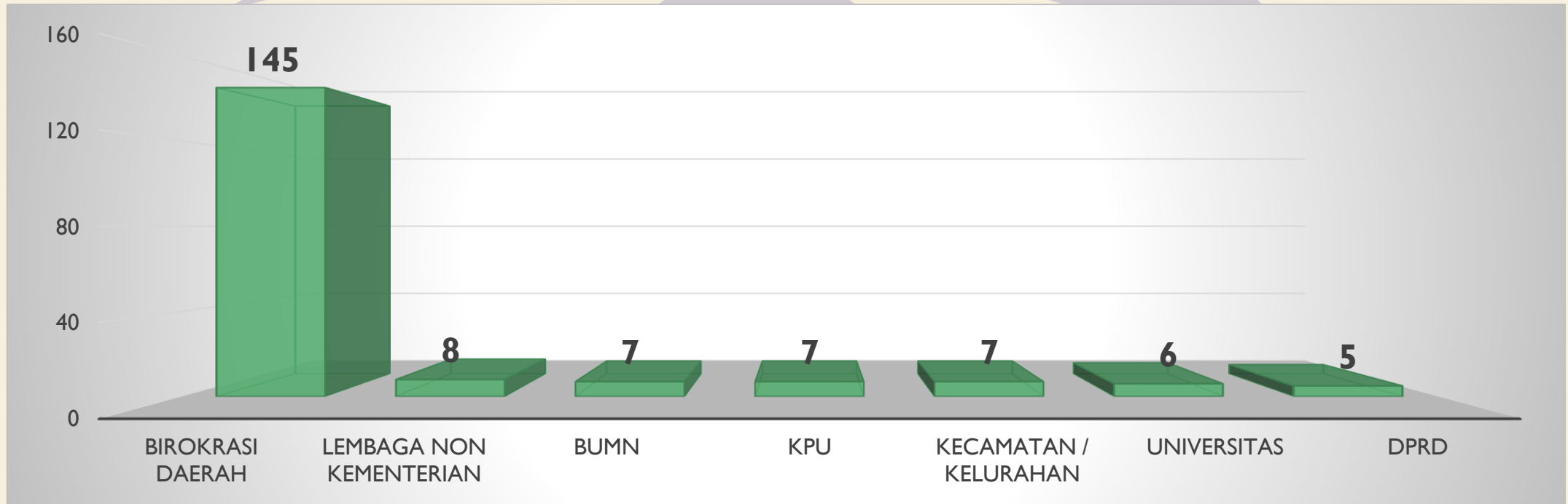
KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN PROVINSI (5 TERATAS)

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)	Nilai Suap (Rp Miliar)
Jawa Timur	19	223,5	-
Jawa Tengah	16	13,5	-
Jawa Barat	15	76,6	0,5
Sumatera Utara	14	33	-
DKI Jakarta	11	110,5	2,3

- APH pada level provinsi yang paling banyak menindak kasus korupsi adalah provinsi Jawa Timur sebanyak 19 kasus korupsi.
- Sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di nasional sebanyak 5 kasus atau sekitar 2 persen. Sedangkan kasus korupsi yang terjadi di daerah sebanyak 205 kasus 97 persen.

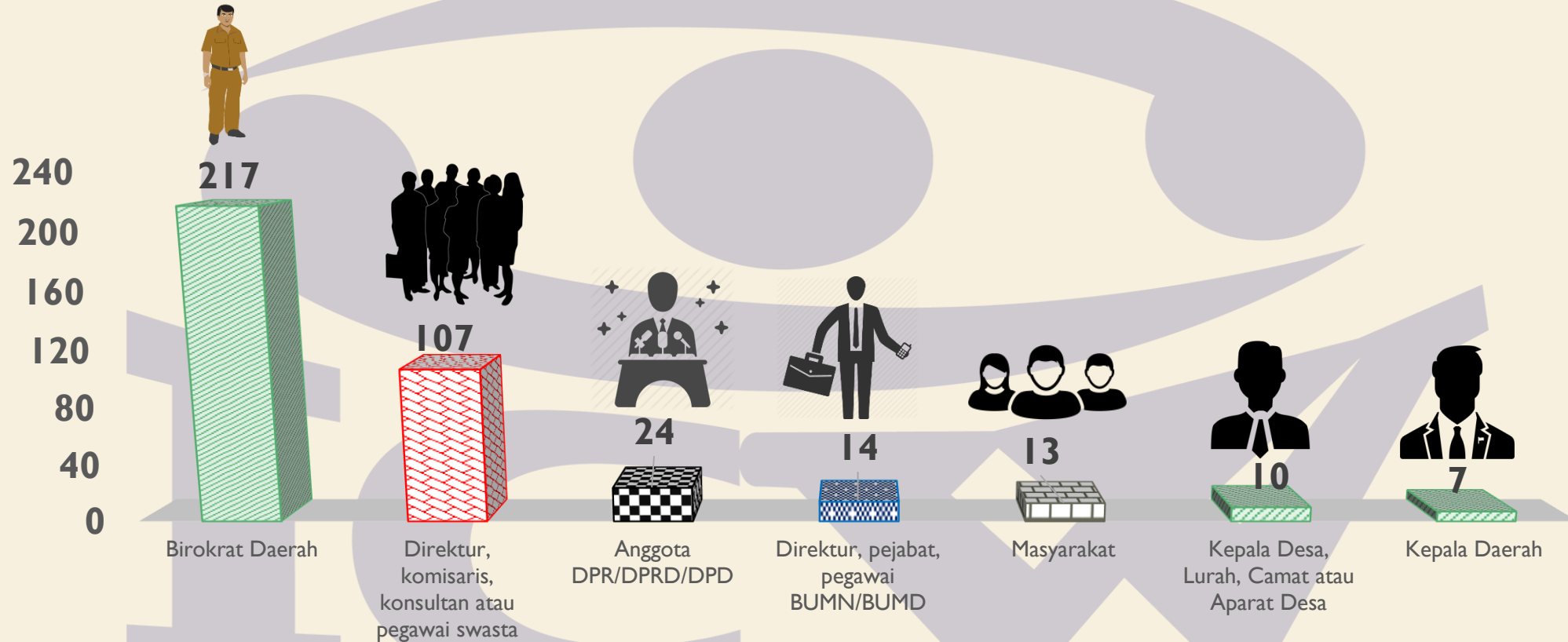
INDONESIA CORRUPTION WATCH

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN LEMBAGA (7 TERATAS)



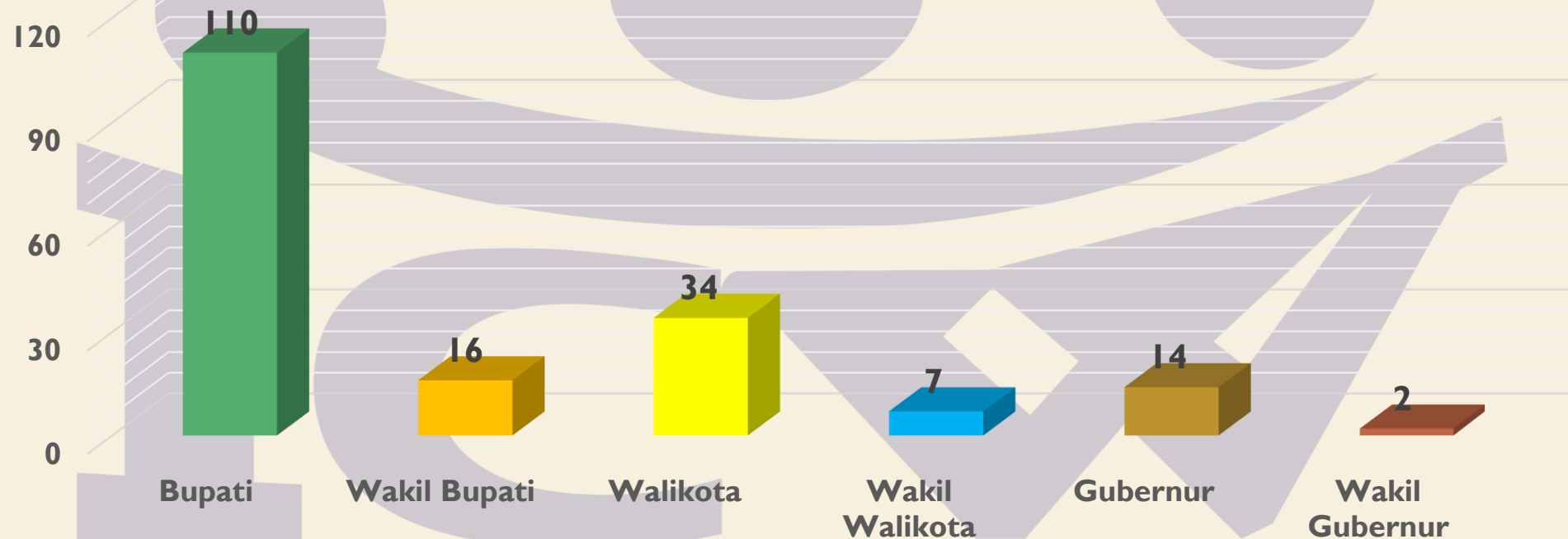
- Kasus korupsi paling banyak terjadi di birokrasi daerah. Dari 210 kasus korupsi, 69 persen terjadi di birokrasi daerah.
- Kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran atau kewenangan di Kementerian masih sedikit diungkap. APH justru lebih banyak menyidik kasus di lembaga non-kementerian.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tentang anti-kriminalisasi bertolak-belakang dengan fakta banyaknya korupsi di birokrasi daerah.

PELAKU KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA SEMESTER I 2016 BERDASARKAN JABATAN (7 TERATAS)



- Sebanyak sembilan kepala daerah menempati peringkat ketujuh aktor yang paling banyak tersangkut kasus korupsi, sebagian besar adalah Bupati yang diproses oleh APH. Salah satu kasusnya adalah kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 miliar. Saat ini sedang ditangani oleh Kejati Sulawesi Tenggara.
- Dari 24 anggota DPR/DPRD/DPD, empat diantaranya adalah anggota DPR. Kasus yang melibatkan anggota DPR antara lain kasus suap proyek 12 jalan di Sumatera Barat dengan tersangka I Putu Sudiartana, anggota komisi III fraksi Partai Demokrat dan kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dengan tersangka Damayanti Wisnu Putranti, anggota komisi V fraksi PDIP.

KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA SELAMA 2010-2015



- Ada sebanyak 183 orang kepala daerah yang diproses oleh aparat penegak hukum selama tahun 2010-2015.
- Kepala daerah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi ialah Bupati dengan 110 orang.
- Rata-rata kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tiap tahunnya sebanyak 30 orang.



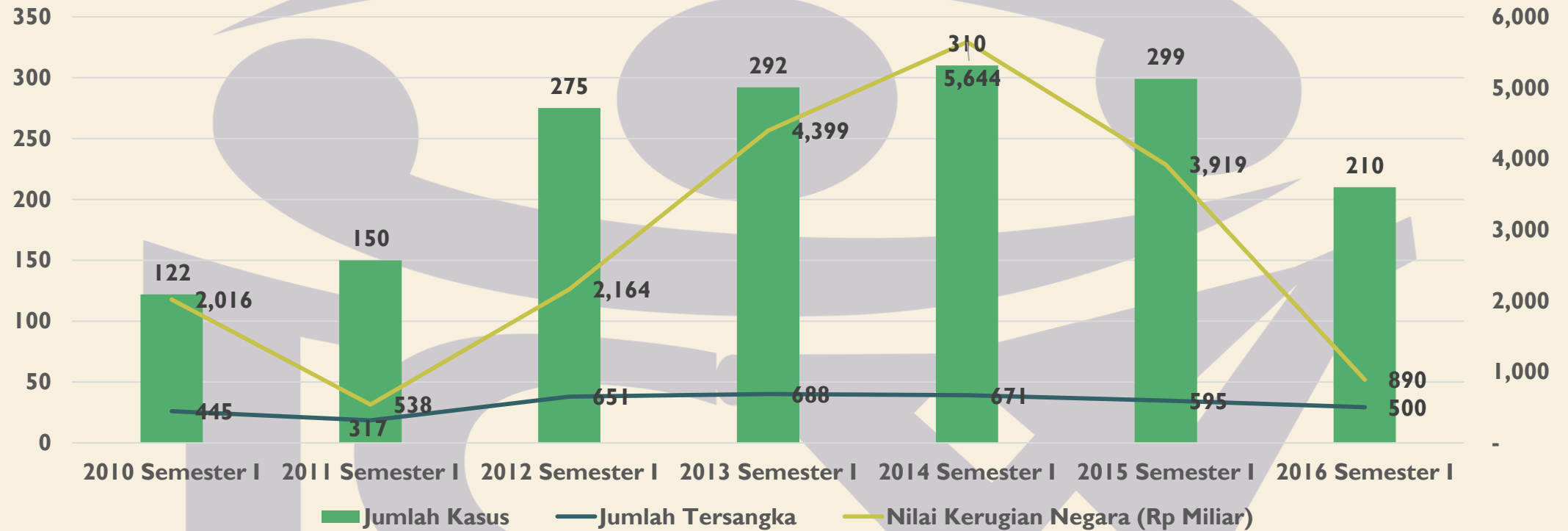
TREN PENYIDDIKAN KASUS KORUPSI

SMT I 2010 – SMT I 2016



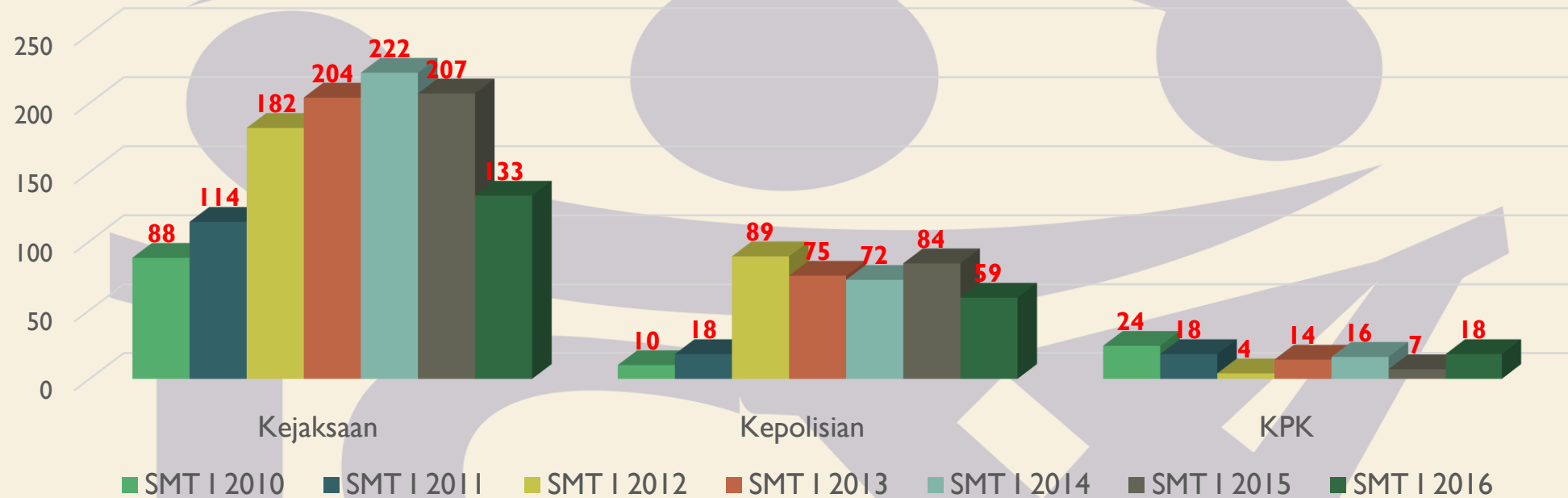
**TREN PENYIDIKAN
DIUKUR BERDASARKAN
BANYAKNYA KASUS
YANG NAIK STATUS
DARI PENYIDIKAN KE
PENUNTUTAN**

TREN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PERIODE SEMESTER I 2010 – SEMESTER I 2016



- Kinerja Penyidikan APH cenderung menurun pada periode sem I 2010 – Sem I 2016. Penurunan terjadi pada sisi nilai kerugian negara sejak Sem I 2014. Sementara dari jumlah tersangka cenderung stagnan.
- Hal ini mungkin disebabkan salah satunya karena pemotongan anggaran penindakan di APH, meskipun kalau dilihat perbandingannya, alokasi anggaran per kasus/perkara tidak terlalu berbeda jauh antara KPK, Jaksa dan Polisi.
- Di Kejaksaan, biaya penanganan satu perkara korupsi hingga tuntas sekitar Rp 200 juta, rinciannya antara lain : Rp 25 juta tahap penyelidikan, Rp 50 juta tahap penyidikan, Rp 100 juta tahap penuntutan, Rp 25 juta eksekusi putusan.
- Di Kepolisian, biaya penanganan satu perkara korupsi mulai dari penyelidikan hingga penyidikan sebesar Rp 208 juta.
- Sedangkan di KPK, biaya penyidikan mempunyai pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Setiap perkara yang disidik oleh KPK sekitar Rp 141 juta.

TREN KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN SELAMA SEM I 2010 – SEM I 2016 BERDASARKAN APH



- Tren penyidikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menurun. Penurunan kinerja Kejaksaan terjadi sejak tahun 2014 sementara penurunan kinerja Kepolisian sejak tahun 2015.
- Tren penyidikan yang dilakukan oleh KPK cenderung fluktuatif. Menurunnya kinerja KPK lebih banyak dipengaruhi oleh serangan kepada KPK pada semester I 2015.



KINERJA PENYIDIKAN (TUNGGAKAN KASUS) SEM I 2016

KINERJA PENYIDIKAN APH SEMESTER I 2016

Aparat Penegak Hukum	Kasus korupsi berstatus Penyidikan pada Sem II 2015	Perkembangan semester I 2016		Total (a+b)
		a. Ada perkembangan (naik dari Penyidikan ke Penuntutan)	b. Belum ada perkembangan (Status tetap di Penyidikan)	
Kejaksaan	639	112 (17,5%)	527 (82,5%)	639
Kepolisian	246	35 (14,2%)	211 (85,8%)	246
KPK	26	9 (34,6%)	17 (65,3%)	26
TOTAL	911	156 (17,1%)	755 (82,8%)	911

- Pada Sem II 2015, APH memiliki 911 kasus korupsi yang masih tetap berada ditahap penyidikan. Dari total kasus tersebut, jumlah terbanyak berada di kejaksaan (639 kasus), Kepolisian (246 kasus) dan KPK (26 kasus).
- Hasil pemantauan atas perkembangan penanganan kasus tersebut pada Sem I 2016 ditemukan hanya 156 kasus (17,1 persen) yang naik ke penuntutan. Sedangkan sisanya, 755 kasus (82,8 persen) masih tetap di tahap penyidikan (Tunggakan kasus).
- Tunggakan kasus terbesar pada sem I 2016 adalah Kejaksaan 527 kasus (82,5 persen). Sementara Kepolisian menunggak 211 kasus (85,8 persen), dan KPK 17 kasus (65,3 persen)

PROFIL DAN CONTOH KASUS YANG NAIK DARI PENYIDIKAN KE PENUNTUTAN PADA SEM I 2016

- Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS DKI Jakarta 2014 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 50 miliar. Kasus ini ditangani oleh Bareskrim dan sudah ada vonis terhadap Alex Usman selaku mantan kepala seksi sarana dan prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
- Kasus dugaan korupsi dana swakelola kegiatan pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 43 miliar. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan terdakwa Wagiman sedang dalam proses persidangan.
- Kasus dugaan suap proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro di Kabupaten Deiyai dengan nilai uang suap sebesar Rp 1,7 miliar. KPK melakukan operasi tangkap tangan Dewie Yasin Limpo, anggota DPR fraksi Hanura dan di vonis enam tahun penjara.

PROFIL DAN CONTOH KASUS YANG TETAP DITAHAP PENYIDIKAN (TUNGGAKAN) PADA SEM I 2016

- Kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2012 yang melibatkan Direktur di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto dengan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,12 triliun. Kasus ini masih disidik oleh KPK dari tahun 2014.
- Kasus dugaan pengadaan alat kesehatan buffer stock yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah dengan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6,1 miliar. Kasus ini masih ditangani oleh KPK. Pada tahun 2014 KPK mengambil alih kasus ini yang sebelumnya ditangani oleh Bareskrim.
- Kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kemenkominfo yang melibatkan Kepala Balai Penyedia & Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Kemenkominfo, Doddy Nasiruddin dan Direktur PT. Multi Data Rancana Prima yang menjadi rekanan. Kasus ini masih disidik oleh Kejaksaan Agung dari tahun 2013.
- Kasus dugaan korupsi pembangunan stadion utama Gelora Bandung Lautan Api yang melibatkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemkot Bandung, Yayat A Sudrajat dengan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun. Kasus ini sedang disidik oleh Bareskrim pada tahun 2015.
- Kasus dugaan korupsi program penanaman pohon di Pertamina Foundation yang melibatkan Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina. Kasus ini masih disidik oleh Bareskrim sejak tahun 2015.

LIMA KEJAKSAAN YANG MEMILIKI TUNGGAKAN KASUS PALING BANYAK (KASUS TETAP DITAHAP PENYIDIKAN)

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)
1.	Kejaksaan di Jawa Timur	45	325
2.	Kejaksaan di Sumatera Utara	38	1.172
3.	Kejaksaan di Sulawesi Selatan	34	66,6
4.	Kejaksaan di Papua	25	57,7
5.	Kejaksaan di NTT	23	93,5

- Kasus dugaan korupsi sewa pesawat di Dinas Perhubungan Pemkab Jember dan Pembangunan Bandara Notohadinegoro di Jawa Timur yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4,5 miliar. Kasus ini melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Jember dan ditangani Kejari Jember tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan prasarana kantor dan rusunawa di Kota Sibolga yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 5,3 miliar. Kasus ini melibatkan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah Sibolga dan ditangani oleh Kejati Sumatera Utara tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi bansos pengelolaan tanaman terpadu kedelai yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,1 miliar. Kasus ini melibatkan PNS Dinas Pertanian Sengkang dan ditangani oleh Kejari Sengkang tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 miliar. Kasus ini melibatkan Kadis PU Nabire dan ditangani Kejari Nabire tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Timor Tengah Utara. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Dinas PPO dan ditangani oleh Kejari Kefanemanu tidak jelas perkembangannya.

LIMA POLDA YANG MEMILIKI TUNGGAKAN KASUS PALING BANYAK (KASUS TETAP DITAHAP PENYIDIKAN)

No	Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)
1.	Kepolisian di Jawa Timur	17	21,4
2.	Kepolisian di Sulawesi Selatan	14	24,6
3.	Kepolisian di Sulawesi Utara	11	22,8
4.	Kepolisian di Sumatera Utara	11	7,4
5.	Kepolisian di Papua	10	57,8

- Kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknik DPRD Surabaya yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 3,7 miliar. Kasus ini melibatkan Sekwan Kota Surabaya dan masih ditangani oleh Polrestabes Surabaya tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi anggaran yang dikelola Sekretariat KPU Palopo. Kasus ini melibatkan sekretaris dan Bendahara KPU Palopo dan sedang ditangani oleh Polres Palopo tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Minahasa. Kasus ini melibatkan Kepala Disdikpora dan masih ditangani oleh Polres Minahasa tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas PU. Kasus ini melibatkan Sekretaris Dinas dan masih ditangani oleh Polres Pakpak Bharat tapi tidak jelas perkembangannya.
- Kasus dugaan korupsi dana subsidi Perum Damri Jayapura. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Perum Damri Jayapura dan masih ditangani oleh Polresta Jayapura tapi tidak jelas perkembangannya.

KESIMPULAN

- Penindakan kasus korupsi pada semester I 2016 mengalami penurunan. Penurunan terjadi terutama dari sisi jumlah kasus dan kerugian negara.
- Kinerja penindakan (Penyelidikan → Penyidikan → Penuntutan) ditentukan oleh anggaran, penyidik, tensi politik antar APH, serta komitmen pemimpin di masing-masing APH.
- Birokrat di daerah masih mendominasi dalam melakukan korupsi.
- Korupsi banyak terjadi di pemerintahan daerah, terutama di sektor pelayanan publik.
- Inpres No. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diduga ikut berkontribusi terhadap menurunnya kinerja penyelidikan APH pada semester I 2016. Hal ini terjadi karena APH mulai menunda mengungkap status kasus atau status tersangka pada publik.
- Sekitar 82,8 persen kasus korupsi tidak jelas perkembangannya selama 2010 hingga 2015. Kinerja penyidikan APH terutama Kejaksaan dan Kepolisian masih buruk.
- Kinerja penindakan korupsi oleh KPK meningkat di semester I 2016, terutama dalam OTT. KPK sudah mulai bangkit dari keterpurukannya setelah mengalami serangan berat pada akhir 2015 dan awal 2016. Pimpinan KPK yang baru nampaknya sudah mampu memulihkan kinerja penindakan KPK.
- Untuk meningkatkan penanganan kasus korupsi terutama di KPK, Presiden pun harus cepat tanggap dalam isu yang kaitannya dengan KPK. Karena hal tersebut terbukti dalam kasus cicak vs buaya jilid 3.
- Informasi penanganan kasus korupsi masih belum transparan. Hal ini yang menyulitkan masyarakat untuk mengawasi kinerja penanganan kasus korupsi di masing-masing wilayah/daerah.

REKOMENDASI

- Untuk mengantisipasi penurunan kinerja penanganan kasus korupsi, KPK perlu mendorong peningkatan supervisi dan koordinasi di Kepolisian dan Kejaksaan.
- Peran BPKP harus diperkuat dalam pengawasan anggaran, pelaksanaan pengadaan dan asistensi untuk mencegah korupsi. Pemerintah juga harus memikirkan strategi untuk melindungi pelaksana dalam penggunaan anggaran di daerah dari kesewenang-wenangan kepala daerah.
- Perlu ditinjau ulang pelaksanaan Inpres 1 tahun 2016 karena inpres ini berpotensi melindungi pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang.
- APH harus meningkatkan kinerja penyidikan mengingat masih banyak tunggakan kasus. Pemotongan anggaran penindakan perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap kinerja penyidikan.
- Khusus KPK, jangan hanya menysasar aktor korupsi di lembaga peradilan, namun juga harus menindak pelaku korupsi di lembaga penegak hukum.
- APH perlu membuka secara periodik penanganan kasus korupsi terutama di daerah untuk mendorong partisipasi publik dalam mengawasi kasus korupsi.

GLOSSARY

1. **Markup** : Pengelembungan harga pengadaan barang atau jasa dari harga wajar/pasar.
2. **Mark Down** : Menurunkan nilai barang (asset) yang dijual oleh pemerintah kepada pihak ketiga.
3. **Penggelapan** : Menggunakan dan memiliki baik sebagian atau seluruhnya asset atau anggaran negara yang berada dalam penguasaannya.
4. **Laporan fiktif** : Ada laporan penggunaan anggaran, tetapi realisasinya tidak ada.
5. **Penyalahgunaan anggaran** : Penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
6. **Suap/ Gratifikasi** : Memberikan sesuatu baik barang, uang, fasilitas yang bisa mempengaruhi kebijakan / Pemberian sesuatu baik barang, uang kepada pejabat publik yang tidak.
7. **Penyunatan/ Pemetongan** : Permintaan atau pengambilan secara paksa sebagian hak milik orang lain.
8. **Pemerasan** : Pemaksaan pemberian imbalan untuk mengubah kebijakan atau kewenangan.
9. **Penyalahgunaan wewenang** : Penyalahgunaan wewenang biasanya terjadi dalam penebitan izin untuk kegiatan tertentu .
10. **Kegiatan/Proyek Fiktif** : Kegiatan anggaran yang tidak dilakukan oleh pengguna anggaran namun tetap dimuat dilaporan keuangan.
11. **Anggaran Ganda** : Kegiatan yang didanai oleh lebih dari satu mata anggaran, namun menggunakan satu laporan yang sama.
12. **Pungutan Liar** : Pungutan yang dilakukan oleh petugas negara dan pejabat negara tanpa dasar hukum yang jelas.